

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Periode 2020 – 2024 melalui Pendekatan Rasio Keuangan Daerah

Cindhe Wati Kartika Dewi^{1*}, Amelia Putri Arini², Eva Hany Fanida³, Melda Fadiyah Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*E-Mail: 25040674369@mhs.unesa.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 01-05-2026

Revision: 11-05-2026

Published: 14-05-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v3i4.253

ABSTRAK

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2020–2024 menggunakan pendekatan rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian, ketergantungan fiskal, desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Gresik tahun 2020–2024 yang diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Gresik. Analisis data dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kategori sedang hingga tinggi dengan rata-rata 75,77%, sedangkan rasio ketergantungan fiskal masih tergolong tinggi dengan rata-rata 45,39%. Rasio desentralisasi fiskal berada pada kategori sedang sebesar 34,23%. Rasio efektivitas PAD tergolong efektif dengan rata-rata 90,22%, sementara rasio efisiensi menunjukkan kondisi tidak efisien sebesar 112,82%. Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan tren positif namun fluktuatif dengan rata-rata 10,91%. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Gresik secara umum cukup baik, terutama pada aspek kemandirian dan efektivitas, namun masih perlu peningkatan pada efisiensi dan pengurangan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Temuan ini diharapkan menjadi referensi evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD, memperkuat kemandirian fiskal, dan meningkatkan efisiensi manajemen keuangan daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan daerah, Rasio Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Gresik

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Gresik Regency Government during the 2020–2024 period using a regional financial ratio approach, including the independence ratio, fiscal dependency ratio, fiscal decentralization ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and the growth ratio of Local Own-Source Revenue. The study employed a quantitative approach with a descriptive method. The data used were secondary data obtained from the Budget Realization Reports of Gresik Regency for the 2020–2024 period, collected from the Regional Financial and Asset Management Agency of Gresik Regency. Data analysis was conducted using regional financial ratio analysis. The results show that the regional financial independence ratio was in the moderate to high category, with an average of 75.77%, while the fiscal dependency ratio remained

Acknowledgment

high, with an average of 45.39%. The fiscal decentralization ratio was categorized as moderate at 34.23%. The Local Own-Source Revenue effectiveness ratio was considered effective, with an average of 90.22%, whereas the efficiency ratio indicated an inefficient condition at 112.82%. Meanwhile, the Local Own-Source Revenue growth ratio showed a positive but fluctuating trend, with an average of 10.91%. The study concludes that the financial performance of Gresik Regency was generally quite good, particularly in terms of independence and effectiveness. However, improvements are still needed in efficiency and in reducing fiscal dependence on the central government. These findings are expected to serve as an evaluation reference for local governments in optimizing Local Own-Source Revenue, strengthening fiscal independence, and improving the efficiency of regional financial management in a sustainable manner.

Keyword: *Regional Financial Performance, Financial Ratios, Local Own-Source Revenue, Gresik Regency.*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

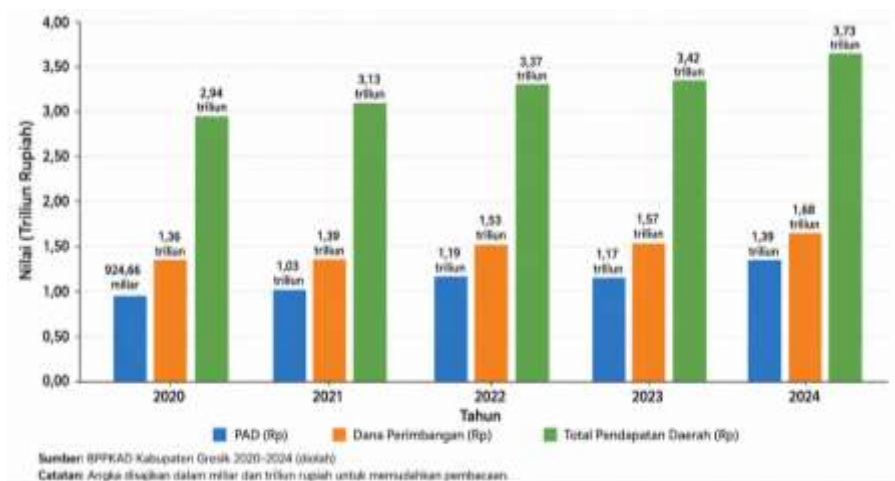
PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan wilayah berkelanjutan (Afandi et al., 2025). Dalam kerangka tersebut, kapasitas fiskal daerah menjadi faktor penting karena menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat (Nasution, 2023; Asiyah & Budiman, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pengelolaan keuangan daerah dituntut semakin efektif, efisien, dan akuntabel (Kartika, 2023). Oleh karena itu, kualitas pengelolaan APBD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Meskipun demikian, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah pemerintah daerah masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan utama daerah belum sepenuhnya optimal (Widodo, 2023; Handraini et al., 2024). Selain itu, persoalan efektivitas pemungutan pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran juga masih menjadi perhatian di berbagai daerah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik maupun mempercepat pembangunan daerah (Habibi et al., 2024). Dengan demikian, evaluasi kinerja keuangan daerah perlu dilakukan secara berkala sebagai dasar perumusan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan daerah. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif mengenai kondisi fiskal daerah melalui sejumlah indikator utama, seperti rasio kemandirian keuangan, tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat, derajat desentralisasi fiskal, efektivitas pencapaian target pendapatan, efisiensi penggunaan belanja, serta pertumbuhan PAD (Hafizah et al., 2024; Hapsari et al., 2025). Melalui pengukuran tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan struktur keuangannya, sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan pendapatan maupun optimalisasi pengelolaan PAD dan belanja daerah (Yulsiati & Choiruddin, 2025; Ravelia et al., 2025). Dengan demikian, analisis rasio keuangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga sebagai dasar perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik perekonomian berbasis industri, perdagangan, dan jasa. Posisi tersebut memberikan peluang yang besar bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, terutama dari sektor pajak daerah, retribusi, serta aktivitas ekonomi lainnya. Namun demikian, perkembangan struktur APBD Kabupaten Gresik periode 2020–2024 menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih mengalami fluktuasi dan belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.



Gambar 1. Grafik Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 1, struktur pendapatan daerah Kabupaten Gresik selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa PAD dan total pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian, Dana Perimbangan dari pemerintah pusat masih menjadi komponen pendapatan yang lebih besar dibandingkan PAD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih memiliki

tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat meskipun memiliki potensi ekonomi daerah yang besar. Selain itu, fluktuasi PAD pada periode pasca pandemi COVID-19 juga menunjukkan adanya dinamika kapasitas fiskal daerah yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kemandirian fiskal dan optimalisasi pengelolaan APBD secara berkelanjutan apabila tidak dilakukan evaluasi kinerja keuangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan daerah menjadi penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pada sejumlah pemerintah daerah masih berada pada kategori rendah hingga sedang, yang mencerminkan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, beberapa daerah telah menunjukkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik, meskipun efisiensi pengelolaan anggaran dan struktur belanja masih perlu ditingkatkan (Ummah & Purwanti, 2025). Selain itu, pertumbuhan pendapatan daerah juga cenderung berfluktuasi sesuai kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal masing-masing wilayah (Praditya & Yusuf, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah bersifat dinamis dan berbeda antarwilayah, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara spesifik sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Meskipun studi mengenai kinerja keuangan daerah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih terbatas pada penggunaan rasio keuangan secara parsial serta belum mengintegrasikan berbagai indikator kinerja dalam satu analisis yang komprehensif. Kajian yang mengintegrasikan berbagai indikator rasio keuangan secara komprehensif masih relatif terbatas, khususnya pada daerah dengan karakteristik industri seperti Kabupaten Gresik. Selain itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji dinamika kinerja keuangan Kabupaten Gresik pada periode pasca pandemi COVID-19 (2020–2024) juga masih terbatas. Padahal, periode tersebut merupakan fase penting dalam pemulihan ekonomi daerah yang berpotensi memengaruhi struktur pendapatan dan belanja daerah secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan rasio keuangan daerah secara komprehensif yang mengintegrasikan rasio kemandirian keuangan daerah, ketergantungan fiskal, desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan PAD dalam satu analisis. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan mengkaji dinamika kinerja keuangan daerah pada wilayah berbasis industri, khususnya Kabupaten Gresik, pada periode pasca pandemi COVID-19 tahun 2020–2024. Penelitian ini juga menyoroti adanya fenomena meningkatnya PAD yang masih diiringi

tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, sehingga menunjukkan dinamika kapasitas fiskal daerah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2020–2024 melalui pendekatan rasio keuangan daerah yang mencakup rasio kemandirian keuangan daerah, ketergantungan fiskal daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan PAD. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai kondisi fiskal daerah serta menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan peningkatan pendapatan daerah, penguatan kemandirian fiskal, dan optimalisasi pengelolaan APBD secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Menurut Muhajirin et al. (2024), pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka keuangan, sedangkan metode deskriptif bertujuan untuk menjabarkan serangkaian deskripsi berupa kalimat terkait kondisi kinerja keuangan daerah tanpa melakukan pengujian hipotesis (Iskandar, 2022).

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik periode 2020–2024. Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, meliputi data Pendapatan Asli Daerah (PAD), total pendapatan daerah, serta belanja daerah.

Sementara itu, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen resmi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Gresik periode 2020–2024. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, ketergantungan fiskal daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan PAD (Kartika, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri. Menurut Bakar & Said (2021), rasio ini mencerminkan sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pajak dan retribusi, mampu menjadi sumber utama pembiayaan daerah. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Dengan kriteria penilaian rasio kemandirian keuangan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

| Persentase | Kriteria |
|------------|---------------|
| 0% - 25% | Sangat Rendah |
| 26% - 50% | Rendah |
| 51% - 75% | Sedang |
| 76% - 100% | Tinggi |

Sumber: Hapsari et al. (2025)

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gresik periode 2020–2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

| Tahun | PAD (Rp) | Dana Perimbangan (Rp) | Rasio (%) | Tingkat Kemandirian |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 2020 | 924.657.913.563,07 | 1.355.693.538.362,00 | 68,20% | Sedang |
| 2021 | 1.031.387.734.236,41 | 1.388.743.965.408,00 | 74,26% | Sedang |
| 2022 | 1.191.799.302.154,29 | 1.528.999.936.386,00 | 77,94% | Tinggi |
| 2023 | 1.171.022.355.999,09 | 1.572.411.245.945,00 | 74,47% | Sedang |
| 2024 | 1.385.938.684.600,76 | 1.682.717.116.125,00 | 82,35% | Tinggi |
| Rata-rata Rasio | | | 75,77% | Tinggi |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gresik selama periode 2020–2024 menunjukkan nilai yang cenderung berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 rasio sebesar 68,20% yang termasuk dalam kategori sedang, kemudian meningkat menjadi 74,26% pada tahun 2021 dan 77,94% pada tahun 2022 yang masuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya, rasio mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 74,47% (kategori sedang), sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 82,35% yang termasuk dalam kategori tinggi.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gresik selama periode tersebut sebesar 75,77% yang berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan pola hubungan keuangan yang bersifat delegatif, di mana pemerintah daerah telah memiliki tingkat kemandirian fiskal yang kuat dalam pengelolaan keuangannya.

Analisis Rasio Ketergantungan Fiskal Daerah

Rasio ketergantungan fiskal daerah digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Rasio tingkat ketergantungan fiskal daerah merupakan rasio yang mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah (Melambessy, 2022). Rumus rasio ketergantungan fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria penilaian rasio ketergantungan fiskal sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Rasio Ketergantungan Fiskal Daerah

| Persentase | Kriteria |
|-----------------|---------------|
| 0,00% - 10% | Sangat Rendah |
| 10,01% - 20,00% | Rendah |
| 20,01% - 30,00% | Sedang |
| 30,01% - 40,00% | Cukup Tinggi |
| 40,01% - 50,00% | Tinggi |
| ≥ 50,01% | Sangat Tinggi |

Sumber: Hapsari et al. (2025)

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil perhitungan rasio ketergantungan fiskal Kabupaten Gresik periode 2020–2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4. Rasio Ketergantungan Fiskal Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024

| Tahun | Dana Perimbangan (Rp) | Total Pendapatan Daerah (Rp) | Rasio (%) | Tingkat Ketergantungan |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|
| 2020 | 1.355.693.538.362,00 | 2.939.477.566.194,87 | 46,12% | Tinggi |
| 2021 | 1.388.743.965.408,00 | 3.133.574.194.041,41 | 44,32% | Tinggi |
| 2022 | 1.528.999.936.386,00 | 3.366.654.984.393,29 | 45,41% | Tinggi |
| 2023 | 1.572.411.245.945,00 | 3.416.390.957.965,65 | 46,02% | Tinggi |
| 2024 | 1.682.717.116.125,00 | 3.730.420.012.925,76 | 45,11% | Tinggi |
| Rata-rata Rasio | | | 45,39% | Tinggi |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik 2020-2024 (diolah)

Pada Tabel 4, rasio ketergantungan fiskal Kabupaten Gresik selama periode 2020–2024 menunjukkan nilai yang relatif stabil dan berada pada kategori tinggi. Rasio ketergantungan berada pada

kisaran 44%–46%, dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 46,12% dan nilai terendah pada tahun 2021 sebesar 44,32%.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio ketergantungan fiskal selama periode tersebut adalah sebesar 45,39%, yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagai bagian dari total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah, sehingga mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Apabila PAD semakin tinggi, maka otomatis pendapatan daerah juga semakin tinggi dan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi semakin tinggi (Wulandari et al., 2023).

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria penilaian rasio desentralisasi fiskal sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah

| Persentase | Kriteria |
|-----------------|---------------|
| 0,00% - 10% | Sangat Kurang |
| 10,01% - 20,00% | Kurang |
| 20,01% - 30,00% | Cukup |
| 30,01% - 40,00% | Sedang |
| 40,01% - 50,00% | Baik |
| ≥ 50,01% | Sangat Baik |

Sumber: Hapsari et al. (2025)

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Gresik periode 2020–2024 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024

| Tahun | PAD (Rp) | Total Pendapatan Daerah (Rp) | Rasio (%) | Tingkat Desentralisasi |
|-------|----------------------|------------------------------|-----------|------------------------|
| 2020 | 924.657.913.563,07 | 2.939.477.566.194,87 | 31,45% | Sedang |
| 2021 | 1.031.387.734.236,41 | 3.133.574.194.041,41 | 32,91% | Sedang |
| 2022 | 1.191.799.302.154,29 | 3.366.654.984.393,29 | 35,40% | Sedang |

| Tahun | PAD (Rp) | Total Pendapatan Daerah (Rp) | Rasio (%) | Tingkat Desentralisasi |
|------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|------------------------|
| 2023 | 1.171.022.355.999,09 | 3.416.390.957.965,65 | 34,27% | Sedang |
| 2024 | 1.385.938.684.600,76 | 3.730.420.012.925,76 | 37,15% | Sedang |
| Rata-rata Rasio | | | 34,23% | Sedang |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan kriteria rasio desentralisasi fiskal, nilai rasio Kabupaten Gresik selama periode 2020–2024 berada pada kisaran 31%–37%. Seluruh nilai rasio tersebut termasuk dalam kategori sedang. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 37,15%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 31,45%.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio desentralisasi fiskal sebesar 34,23%, yang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah berada pada tingkat menengah, sehingga peran pemerintah pusat melalui dana transfer masih cukup dominan dalam struktur pendapatan daerah.

Analisis Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Melmambessy (2022), rasio ini menunjukkan perbandingan antara realisasi PAD dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Dengan kriteria penilaian rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria Rasio Efektivitas

| Persentase | Kriteria |
|------------|----------------|
| ≥ 100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| ≤ 60% | Tidak Efektif |

Sumber: Hapsari et al. (2025)

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Gresik periode 2020–2024 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Rasio Efektivitas Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024

| Tahun | Realisasi PAD (Rp) | Target PAD (Rp) | Rasio (%) | Tingkat Efektivitas |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 2020 | - | - | | |
| 2021 | 1.031.387.734.236,41 | 1.200.000.000.000,00 | 85,95% | Cukup Efektif |
| 2022 | 1.191.799.202.154,29 | 1.215.570.000.000,00 | 98,04% | Efektif |
| 2023 | 1.171.022.355.999,09 | - | - | - |
| 2024 | 1.385.028.684.600,76 | 1.597.844.135.728,00 | 86,68% | Cukup Efektif |
| Rata-rata Rasio | | | 90,22% | Efektif |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2021, rasio efektivitas sebesar 85,95% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Selanjutnya, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 98,04% yang berada pada kategori efektif.

Pada tahun 2024, rasio efektivitas sebesar 86,68% yang kembali berada pada kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD pada beberapa tahun tersebut telah mendekati target yang ditetapkan, meskipun belum sepenuhnya optimal pada setiap tahunnya.

Data rasio efektivitas pada tahun 2020 dan 2023 tidak dapat dihitung karena tidak tersedianya data target PAD yang lengkap. Oleh karena itu, perhitungan rata-rata hanya didasarkan pada tahun yang memiliki data lengkap, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2024.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio efektivitas PAD Kabupaten Gresik sebesar 90,22%, yang termasuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara umum mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Remanta & Ramadhan, 2024). Dalam konteks keuangan daerah, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria penilaian rasio efisiensi sebagai berikut:

Tabel 9. Kriteria Rasio Efisiensi

| Persentase | Kriteria |
|---------------|----------------|
| $\geq 100\%$ | Tidak Efisien |
| 90,01% - 100% | Kurang Efisien |
| 80,01% - 90% | Cukup Efisien |
| 60,01% - 80% | Efisien |
| $\leq 60\%$ | Sangat Efisien |

Sumber: Diadaptasi dari Kemendagri (dalam Kartika, 2023)

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Gresik periode 2020–2024 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Rasio Efisiensi Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024

| Tahun | Belanja (Rp) | Pendapatan (Rp) | Rasio (%) | Tingkat Efisiensi |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| 2020 | 3.568.293.698.176 | 2.939.477.566.194,87 | 121,39% | Tidak Efisien |
| 2021 | 3.433.486.214.072 | 3.133.574.194.041,41 | 109,57% | Tidak Efisien |
| 2022 | 3.682.758.862.078 | 3.366.654.984.393,29 | 109,36% | Tidak Efisien |
| 2023 | 4.085.733.582.376 | 3.416.390.957.965,85 | 119,59% | Tidak Efisien |
| 2024 | 3.887.408.009.350 | 3.730.420.012.925,76 | 104,20% | Tidak Efisien |
| Rata-rata Rasio | | | 112,82% | Tidak Efisien |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 10, rasio efisiensi keuangan Kabupaten Gresik selama periode 2020–2024 menunjukkan nilai yang berada pada kategori tidak efisien. Rasio efisiensi berada pada kisaran 104%–121%, dengan nilai tertinggi pada tahun 2020 sebesar 121,39% dan terendah pada tahun 2024 sebesar 104,20%.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio efisiensi sebesar 112,82% yang termasuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah belum berjalan secara optimal dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD dari tahun ke tahun. Rasio ini menunjukkan dinamika pertumbuhan kinerja keuangan daerah, apakah mengalami peningkatan atau penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya (Mutsalisah et al., 2025). Rumus rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, analisis rasio pertumbuhan dilakukan dengan melihat tren peningkatan dan penurunan PAD tanpa menggunakan kriteria kategori tertentu, karena rasio pertumbuhan bersifat dinamis dan lebih tepat dianalisis berdasarkan perubahan dari tahun ke tahun. Berikut hasil perhitungan rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik periode 2020–2024 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024

| Tahun | PAD (Rp) | Rasio Pertumbuhan (%) | Keterangan |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 2020 | 924.657.913.563,07 | - | |
| 2021 | 1.031.387.734.236,41 | 11,55% | Meningkat |
| 2022 | 1.191.799.302.154,29 | 15,56% | Meningkat |
| 2023 | 1.171.022.355.999,09 | -1,74% | Menurun |
| 2024 | 1.385.028.684.600,76 | 18,27% | Meningkat |
| Rata-rata Pertumbuhan | | 10,91% | Meningkat |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 11, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi pertumbuhan positif masing-masing sebesar 11,55% dan 15,56%, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar -1,74%, yang mengindikasikan adanya penurunan penerimaan PAD dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024 pertumbuhan PAD kembali meningkat sebesar 18,27%, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja pendapatan daerah. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Gresik sebesar 10,91%, yang menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan, meskipun tidak stabil setiap tahunnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Gresik tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah menunjukkan kondisi cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rasio kemandirian keuangan daerah yang berada pada kategori sedang hingga tinggi dengan rata-rata 75,77%, yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah cukup baik. Namun, rasio ketergantungan

fiskal masih berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 45,39%, yang menunjukkan masih besarnya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Rasio desentralisasi fiskal berada pada kategori sedang dengan rata-rata 34,23%, yang menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum dominan. Rasio efektivitas PAD berada pada kategori efektif dengan rata-rata 90,22%, sedangkan rasio efisiensi berada pada kategori tidak efisien dengan rata-rata 112,82%. Sementara itu, rasio pertumbuhan PAD menunjukkan tren positif namun fluktuatif dengan rata-rata 10,91%.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah Kabupaten Gresik tergolong cukup baik, terutama pada aspek kemandirian dan efektivitas, namun masih terdapat kelemahan pada aspek efisiensi dan tingginya ketergantungan fiskal. Implikasinya, pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi PAD dan efisiensi belanja agar kemandirian fiskal dapat terus diperkuat.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada terbatasnya data pada beberapa indikator serta belum digunakannya faktor non-keuangan seperti kebijakan fiskal, kondisi ekonomi daerah, dan aspek manajerial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain dan melakukan perbandingan antar daerah agar hasil analisis lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. R., Kamdani, & Ardiansyah. (2025). Otonomi Daerah sebuah Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 211–217.
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(2), 100-109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>
- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Asiyah, M. R., & Budiman, H. (2025). Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Implementasi Otonomi Daerah. *CONSTITUER: Jurnal Hukum Ketatanegaraan Harmonisasi*, 1(2), 73–87. <https://doi.org/10.61863/gr.v4i2.55.74>
- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(2), 1–20.
- Habibi, Utami, W. B., & Samanto, H. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah*

Keuangan Akuntansi Bisnis, 3(1), 483–488.

- Hafizah, T. Z., Y, F. D., A, S. V., & Azzahra, N. (2024). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Negara dan Kabupaten Agam Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4), 274–281.
- Handraini, H., Frinald, A., Asnil, & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 593–600.
- Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P., & Umroh, R. U. Z. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 154–164.
- Iskandar, R. A. (2022). Kajian Nilai Perjuangan dalam Novel Mahbub Djunaidi dengan Menggunakan Metode Deskriptif Analisis dan Pemanfaatan sebagai Alternatif Bahan Ajar Novel Sejarah. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 5(2), 160–179.
- Kartika, Y. (2023). Kinerja Keuangan Daerah: Tinjauan Rasio Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, dan Share and Growth. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 3(2), 110–119.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura ditinjau dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal, dan Efektifitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10–15.
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Tahapan Penelitian. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.
- Mutsalisah, A., Kusumastuti, A., & Zaimatunnisa, A. (2025). Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2023. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 5(1), 116–123.
- Nasution, E. Y. (2023). Pemberian Wewenang dan Otonomi Keuangan Daerah di Indonesia : Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Majelis*, 33, 1–14.
- Praditya, R. A., & Yusuf, A. M. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(1), 45–54.
- Ravelia, V., Devy, T., Rahmi, & Nurani, K. (2025). Analisis Kinerja Keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari pada Pemerintahan Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(4), 261–276.
- Remanta, O., & Ramadhan, P. R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Manajemen (JASMIEN)*, 05(04), 457–465.
- Ummah, F. H., & Purwanti, M. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Ditinjau Dari Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Daerah. *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI*, 5(3), 359–370.
- Widodo, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Transfer Pusat, Pendapatan Asli Daerah Dan Pembiayaan Daerah Terhadap Belanja Modal Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 71–84.
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69.
- Yulsiati, H., & Choiruddin. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 3(03), 186–200. <https://doi.org/10.58812/smb.v3i03>